

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN
GAS LPG 3 KG DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Srata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

M ILHAM KURNIAWAN

NIM. 10975007040



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIFKASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

M Ilham Kurniawan

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg, dan pengawai yang bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta Agen dan penyalur gas LPG 3 Kg yang terdapat di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru. Penentuan jumlah sampel untuk pegawai Dinas Perindistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan menggunakan proposive sampling sehingga di dapat 4 orang pegawai, sementara untuk sampel dari Agen gas LPG 3 Kg menggunakan sensus sample di dapat sebanyak 11 agen dan sampel dari Penyalur gas LPG 3 Kg dengan menetapkan sampel 10% menggunakan teknik Slovin sehingga di didapatkan 85 penyalur dari jumlah populasi sebanyak 600 penyalur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk tabel-tabel serta penggambaran melalui hasil wawancara di lapangan dengan melihat jawaban-jawaban responden terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 KG di Kota Pekanbaru, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg dalam bentuk data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan interpersi terhadap hasil yang relevan kemudian ditarik kesimpulan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat masih belum sesuai peraturan alias belum optimal. Dimana faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg yaitu meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Keyword : *Pengawasan, Distribusi, Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Sang khalik dan makhluknya, Maharaja dari segala raja. Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, yang kasih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah yang Wujud, yang Baqo, dan atas perkenan-Nya pula Sezarroh kuasanya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai pujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambatan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makhluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khalik-Nya.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI KOTA PEKANBARU”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Mu naqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang

telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah dan Ibuanda Tersayang, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materiil serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T Amien.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri M.Si selaku Penasehat Akademik penulis pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Ratna Dewi S.Sos M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikirannya dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Pihak Instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat keluarga dan saudara yang terima kasih atas supportnya selama ini yang selalu mengingatkan penulis untuk semangat dalam penyelesaian kuliah dan juga skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat terdekat penulis, Refi, Adi, Meitri, Mella, Amy, Ezha, Yolla, Rose, Lisma, Dini, Nanda, Yayat, Fauzan, Yulia, Winda yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal Cangkatan 2009 Jurusan Adm. Negara, yang tak dapat di sebutkan satu per satu namanya karena kalian semua adalah sahabat penulis yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, *You're all my best friend.*

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 10 Mei 2013
Penulis

M Ilham Kurniawan
10975007040

DAFTAR ISI

ABSTARK

HAL PERSETUJUAN SKRIPSI

HAL PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.....	12
2.2 Pelaksanaan Pengawasan.	15
2.2.1 Tipe Pengawasan.....	20
2.2.2 Teknik Pengawasan.....	21
2.2.3 Tujuan Pengawasan.....	23
2.3 Pendistribusian Gas LPG 3 Kg.....	24
2.3.1 Pengertian Gas LPG.....	24
2.3.2 Distribusi.....	26
2.3.3 Sasaran Distribusi Gas LPG 3 Kg.....	28
2.4 Konsep Operasional.....	30
2.5 Kerangka Pemikiran.....	31

2.6 Teknik Pengukuran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel.....	37
3.4 Jenis Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Letak Geografis.....	41
4.2 Klimatologi Dan Hidrologi.....	42
4.3 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	43
4.3.1 Sejarah Singkat / Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	43
4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	44
4.3.3 Uraian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Identitas Responden.....	57
5.2 Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Pada Agen dan Penyalur Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.....	60
5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan.....	62

5.2.2 Tanggapan Responden.....	64
5.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru.....	97

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Penelitian.....	31
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	37
Tabel 3.2 Data Sampel Pegawai Dinas.....	38
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat umur.....	58
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agen Penyalur Gas LPG 3 Kg.....	59
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg.....	65
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Jumlah Tabung Gas LPG 3 Kg Yang Didistribusikan.....	67
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Sasaran Dari Distribusi Gas LPG 3 Kg.....	68
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Waktu Distribusi Gas LPG 3 Kg.....	70
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Mutu/ kualitas Gas LPG 3 Kg Yang Didistribusikan.....	71
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/Sanksi Yang diberikan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	72
Tabel 5.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Jumlah, Sasaran, dan Mutu Gas LPG 3 Kg.....	73
Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.....	75
Tabel 5.12 Tanggapan Responden Mengenai Tanggapan Cepat dari Agen terhadap Kerusakan/Kebocoran Tabung Gas LPG 3 Kg.....	76

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Kendala yang dihadapi dalam Distribusi Gas LPG 3 Kg.....	78
Tabel 5.14 Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	79
Tabel 5.15 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Kelengkapan Dokumen dalam Melakukan Pendistribusian gas LPG 3 Kg.....	80
Tabel 5.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.....	81
Tabel 5.17 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Peredaran Peralatan Pelengkap Gas LPG 3 Kg.....	83
Tabel 5.18 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Ketersediaan Peralatan Pelengkap yang Berstandar SNI dari Gas LPG 3 Kg.....	84
Tabel 5.19 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Kelayakan dari Peralatan Pelengkap/Aksesoris Gas LPG 3 Kg.....	85
Tabel 5.20 Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	86
Tabel 5.21 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI.....	87
Tabel 5.22 Tanggapan Responden Mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisai.....	88
Tabel 5.23 Tanggapan Responden Mengenai Pemanggilan terhadap Agen/penyalur Untuk Melakukan Sosialisai.....	90
Tabel 5.24 Tanggapan Responden Mengenai Pengecekan langsung ke Agen/penyalur terkait Keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.....	91
Tabel 5.25 Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Sosialisasi Memberikan Pemahaman yang baik Terkait Keamanan dalam Distribusi	

gas LPG 3 Kg.....	92
Tabel 5.26 Tanggapan Responden Mengenai Kerugian yang di dapat Apabila Tidak Dilakukan Sosialisasi Distribusi gas LPG 3 Kg.....	93
Tabel 5.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG.

Peralihan konvesi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan untuk memasak di karenakan kira-kira pada tahun 2025 minyak tanah yang terdapat di Indonesia di perkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG, Apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG, Penggunaan gas LPG dimaksudkan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus. Gas LPG merupakan

bahan bakar yang di ambil dari gas bumi yang terkandung di dalam bumi dan di olah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di indonesia, sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.

Dalam era modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan anda. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada sisi lain, gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya

Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat.

Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan

implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang di wujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan dekat dengan masyarakat lokal.

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah tersebut. Kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini berarti daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dengan pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan Undang-undang 1945 pemerintah harus berperan seta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran.

Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat, Di Pusat Kementerian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan

dan pendistribusian gas LPG 3 Kg. dengan masuknya gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru akan membuat pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pengembangan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah mengalami kemajuan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan masyarakat yang pesat pula, sebagaimana dalam visi kota Pekanbaru yaitu Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam dekade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru. maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusian ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan kriminal terhadap gas LPG 3 Kg sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 Kg. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah, pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan masyarakat bawah dan miskin saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat hidup kaum terpinggirkan karena pengawasan tersebut adalah bagian yang integrasi dari pengelolaan sumber daya alam, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 Kg.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gas LPG 3 Kg Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.

d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Selama ini proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru berupa :

Pertama, masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 15.000,- sampai Rp 16.000,- pertabung di dalam Kota Pekanbaru dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah, seharusnya penyalur menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 14.000,- pertabung. Harga ini berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru yang didasari atas Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, maka harga jual gas LPG 3 Kg adalah Rp 14.000,-.

Kedua, Permasalahan yang ditemukan di lapangan berupa masih belum sepenuhnya lengkap dan berfungsi dengan baik sarana dan prasarana yang ada pada Agen gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, seperti keadaan gudang yang masih kurang memadai, belum berfungsinya Alat Dekstop (Alat Perangkat Komputer)

yang berguna untuk memonitor dan mengawasi proses transaksi jual beli gas LPG 3 Kg dengan masyarakat, selain itu juga masih kurangnya peralatan keamanan berupa racun api untuk memadamkan api dan timbangan Becana air.

Ketiga, Penyalur gas LPG 3 Kg masih melakukan penebusan kepada 2 Agen gas LPG 3 Kg bahkan lebih, selain itu penyalur juga melakukan penjualan gas LPG 3 Kg keluar Kota Pekanbaru yaitu ke Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena setiap tabung memiliki segel dan tanda yang berbeda di setiap daerah untuk Kota Pekanbaru memiliki tanda segel berwarna merah serta dapat mengurangi pasokan buat masyarakat di dalam Kota Pekanbaru.

Keempat, Disinyalir terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kota Pekanbaru, penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat Kota Pekanbaru dari segi keberadaan, keamanan karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg.

Kelima, Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan keselamatan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kg, yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang membawa dan menjajakan gas LPG 3 Kg menggunakan motor keranjang dengan membawa gas LPG 3 Kg melebihi kapasitas dan daya angkut barang berbahaya.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dan gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat sebagaimana dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan meneliti dengan judul :

**“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.
2. Apa saja Faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

1.3 Batasan Permasalahan

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan batasan masalah. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu hanya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Agen gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Adapun alasan peneliti melakukan batasan masalah ini sebagai berikut :

1. Batasan masalah dilakukan karena cakupan badan usaha yang ada di Kota Pekanbaru sangat banyak sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian terhadap Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dan Agen Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

2. Batasan masalah ini dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat mengefesienkan waktu, tenaga dan biaya peneliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu Administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat memperoleh pengalaman dan meningkatkan serta menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengawasan khususnya dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg.

3. Sebagai bahan informasi dalam meningkatkan pengawasan dalam menjalankan tugasnya.
4. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diterima penulis selama mengikuti perkuliahan di bangku kuliah bagi mahasiswa.
5. Untuk menambah referensi kepustakaan dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab dan sub bab antara lain meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan Latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematikan penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori-teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian serta hipotesis yang

,merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yang penulis teliti serta struktur dan jenis kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait dengan penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang Pelaksanaan pengawasan distribusi gas lpg 3 kg di Kota Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas dengan baik.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Konsep teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, juga sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) (Sugiyono, 2007:55). Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi konsep untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan telaah pustaka dibawah ini :

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan manusia sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manusia sebagai salah satu sumber daya organisasi selalu berperan aktif dalam organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Fungsi dari manajemen terbagi dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan (G.R Terry).

MSDM adalah Suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada organisasi / perusahaan. Dengan demikian,

fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Menurut Hasibuan, Malayu S.P. (2003:10) “Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.” Sumber daya manusia merupakan indikator terpenting di dalam sebuah organisasi publik maupun bisnis. Peran SDM sangat mempengaruhi jalannya organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Setiawan (Rivai,2005:14) menyatakan strategis sumber daya manusia juga menyangkut masalah kompetensi sumber daya manusia dalam kemampuan teknis, konseptual, dan hubungan manusiawi.

MSDM didefinisikan Sebagai suatu proses pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu, karyawan dalam organisasi serta masyarakat. J.B Miner dan M.G Miner (Dalam Hasibuan 2003:11).

Bambang Wahyudi menyatakan “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi”.

Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2003,10) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bidang manajemen yang khusus

mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan semikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

MSDM Menurut Mathis dan Jackson (2006,3) adalah Rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan, Malayu S.P. (2003:9) apa saja persamaan dan perbedaan antara MSDM dengan manajemen personalia yaitu :

1. MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro.
2. MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah factor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif.
3. MSDM pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik.

Lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan, pengorganisaian, pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan dicapai secara efesien, efektif sampai tingkat optimal dengan baik. (Michel J 2003:10).

2.2 Pelaksanaan Pegawai

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an tentang konsep pengawasan :

- 





























































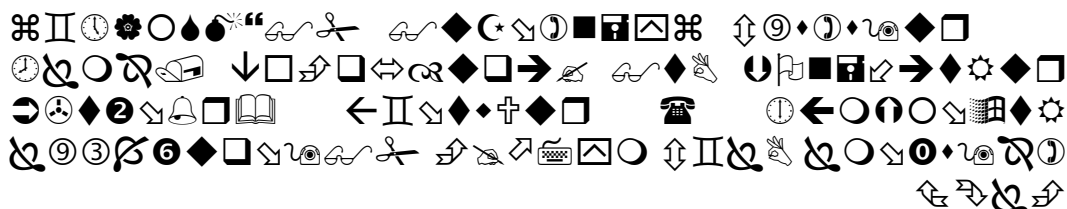







4. *Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al Hadid, 57:4).

3. Tentang ketelitiannya dan kedekatannya ketika melakukan pengawasan.



16. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S Qaaf, 50:16).

Pengawasan yang paling efektif hendaknya adalah yang datang dari diri sendiri. Al Qur'an telah memberikan petunjuk bahwa kita memang tidak sedikitpun bisa lepas dari pengawasan Allah Swt, di dalam islam juga terdapat berbagai penjelasan mengenai pengawasan, dimana pengawasan yang hakiki hanyalah milik Allah Swt, serta pengawasan yang di lakukan oleh manusia terhadap diri dan lingkungannya tentulah memiliki keterbatasan.

"Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya". (S.P Siagian, 2004:125).

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat

melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

Menurut Sujatmo (2004:12) “Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Dari kutipan ini memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan itu merupakan salah satu fungsi manajemen dimana fungsi ini dapat memastikan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diinginkan atau semestinya.

“Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengamilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ”. (Kurniawan, 2005:317). Dari penjelasan ini memberikan suatu pemahaman bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan suatu ukuran yang berguna untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam suatu kegiatan.

Menurut Winardi (2003:585) “Pengawasan adalah Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan segalanya yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya oleh manajer.

Menurut Nanang Fattah (2004:102) “Pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai akhir proses pengawasan bergantung pada informasi yang diterima”.

Lebih lanjut menurut Herujito (2002:242) “Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi”. dari kutipan diatas memberikan suatu pemahaman bahwa pengawasan itu suatu tindakan pengamatan dan pemantauan hal-hal yang dilakukan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tempat.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan nantinya dijalankan.

Pelaksanaan pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan pemimpin, yaitu “Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengawasi kinerja pegawai”. (Mardiasmo, 2004:213). Dari kutipan di atas memberikan gambaran bahwa terlaksananya pekerjaan yang ditugaskan kepada para pegawai maka terlebih dahulu pimpinan harus mengawasi segi kedisiplinan kerja sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya tujuan dapat tercapai dengan baik, maksud pengawasan ini untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainya dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Winardi “Pengawasan itu harus mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Kansil (2002:12) “Pengawasan itu penting untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintah, “Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang baik adalah antara lain :

1. Menentukan ukuran perencanaan.
2. Menilai, yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
3. Mengadakan koreksi dari pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang sedang berjalan.

Sedangkan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan antara lain :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab para pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas.
2. Mendidik para pegawai agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan atau kerugian yang tidak diinginkan.

2.2.1 Tipe Pengawasan

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, yaitu :

1. Pengawasan yang bersifat rutin.

Pengawasan dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala. (Contoh : Dilakukan setiap 1 bulan sekali). Pengawasan ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil.

2. Pengawasan mendadak atau sidak.

Pengawasan yang sifatnya mendadak (*incognito*) yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan tergantung kebutuhan. Misalnya Pada waktu-waktu yang tak terduga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Pengawasan juga dapat dilakukan di golongan menjadi 2 tipe yang lain yaitu : pengawasan oleh pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha itu sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin/peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Untuk melaksanakan pengawasan kata Kurniawan (2005:321) dapat dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : Menetapkan standar dan metode penilaian kerja, penilaian terhadap kinerja, serta pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha. Dengan demikian dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah.

2.2.2 Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Siagian (2004:72) Teknik pengawasan ada 2 macam yaitu :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer/pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk :

- a. Inspeksi langsung
- b. Laporan dari tempat.

2. Pengawasan tidak langsung

Merupakan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :

- a. Laporan tertulis.
- b. Laporan lisan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam segala kesiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan menuntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam kegiatan pengawasan.

Sedangkan menurut Bahori, Teknik pengawasan yang ditinjau dari sifat dapat dibedakan yaitu :

1. Pengawasan preventif

Dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan :

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
- c. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi.

2. Pengawasan represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban beserta bukti-bukti mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau usaha.

2.2.3 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Menurut Manullang (2001:172) Tujuan dari pengawasan adalah Mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Sementara berdasarkan Maman Ukas (2004:337) mengatakan Tujuan dari pengawasan yaitu :

1. Mensuplai pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut.

Jadi dapat di simpulkan pengawasan yang baik itu dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.
4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
5. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
7. Pengawasan harus ekonomis dan mudah dimengerti.
8. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi ke arah yang lebih baik lagi.

2.3 Pendistribusian Gas LPG 3 Kg

2.3.1 Pengertian Gas LPG

Gas LPG atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand LPG, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C_5H_{12}) yang dicairkan. LPG lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap LPG cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm². Perbandingan komposisi, propana (C_3H_8) : butana (C_4H_{10}) = 30 : 70 Nilai

kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. LPG Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung 3 kg dan curah.

LPG merupakan bahan bakar gas cair yang tidak berwarna dan berbau. Tanpa hembusan angin, LPG akan menghambur secara perlahan dalam udara. Agar kebocoran gas dapat terdeteksi, Pertamina telah memberikan zat khusus dalam gas LPG yang disebut Mercaptane. Baunya yang khas dan menusuk dapat segera tercium oleh salah satu anggota keluarga. Diharapkan segera tanggap terhadap kebocoran pada peralatan LPG.

Sifat LPG perlu diketahui, gas LPG bersifat Flammable (mudah terbakar). Dalam batas Flammability, LPG adalah sumber api yang terbuka. Sehingga letup (percikan api) yang sekecil apapun dapat segera menyambar gas LPG. Maka pastikan bahwa bau gas LPG telah hilang sama sekali dari dalam rumah, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini karena sifat gas LPG yang sangat lamban berputar di udara.

Pertamina menggunakan Agen gas LPG 3 Kg dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg. Dengan Agen dan Penyalur gas LPG 3 Kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang gas LPG 3 Kg. Berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi gas LPG lebih rendah daripada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi dapat mencapai Rp 15-20 Trilyun jika program ini berhasil. Gas LPG lebih sulit dioplos dan disalahgunakan, gas LPG lebih bersih daripada minyak tanah. Subsidi gas LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan Brazil.

2.3.2 Distribusi

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efesiensi usaha.

Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu :

1. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
2. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen) ke konsumen.
3. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya.

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut : “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli. “

Sedangkan Warren J. Keegen (2003) mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. “.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu ; Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

1. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

2. Agen Perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu :

a. Agen Penunjang

- Agen pembelian dan penjualan.
- Agen Pengangkutan.
- Agen Penyimpanan.

b. Agen Pelengkap

- Agen yang membantu dalam bidang finansial.

- Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
- Agen yang dapat memberikan informasi.
- Agen khusus.

2.3.3 Sasaran Distribusi Gas LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni
- c. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.

- b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/ KK / Surat Keterangan dari kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
- b. Surat Keterangan RT/RW setempat, atau
- c. Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan.

Pemerintah kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi :

1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
 - a. Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
 - b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas.

- c. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan disub sektor migas.
- 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - a. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
 - b. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM.
 - c. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
 - d. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
- 3. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.
 - a. Pemberian izin usaha perdagangan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.
 - c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang.

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Maka peneliti menggunakan indikator - indikator untuk melakukan pengawasan terhadap gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1	Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg	1.Pengawasan Ketetapan Harga Eceran, Jumlah. Sasaran, Waktu, dan Mutu Gas LPG 3 Kg.
		2.Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.
		3.Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI.
		4.Sosialisasi Distribusi, Keamanan dalam Distribusi Gas LPG 3 Kg.

Sumber : Data Olahan 2013

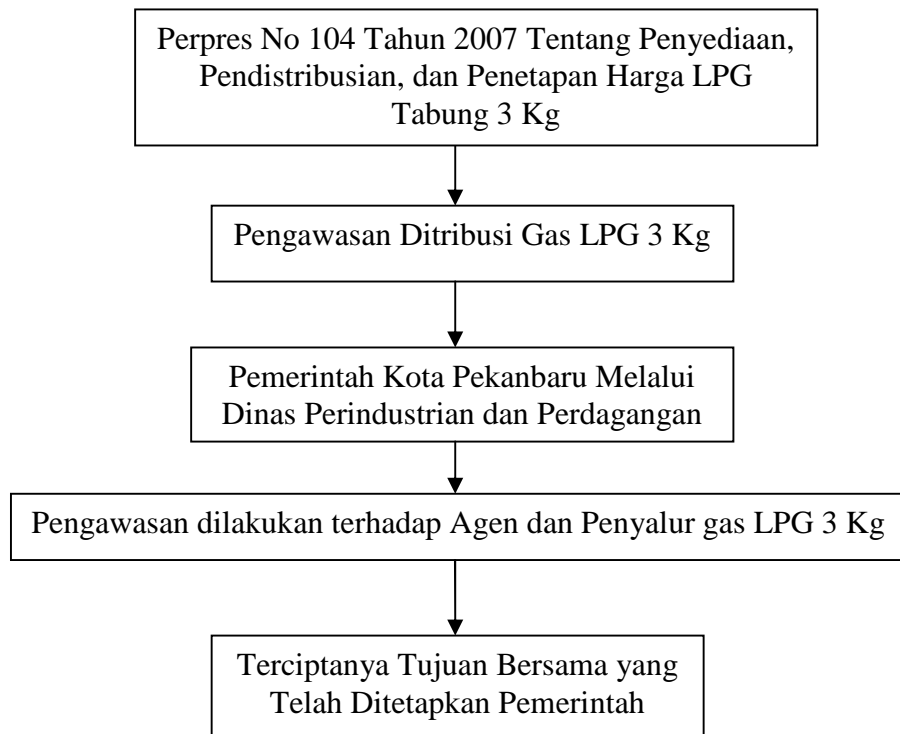
2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan.

Kerangka pemikiran yang peneliti lakukan di jelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut.

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, Peneliti menjelaskan kerangka pemikiran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, menjadi seperti bagan dibawah ini :



2.6 Teknik Pengukuran

Adapun teknik pengukuran dalam hal ini ditujukan agar terdapat kesepahaman penilaian pada penelitian ini, adapun setiap indikator dinilai dengan pengukuran sebagai berikut :

1. Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg.
 - a. Baik : Apabila mayoritas responden menjawab bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selalu mengadakan Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran,

Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg dalam rekapitulasi indikator Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg.

b. Kurang baik : Apabila mayoritas responden menjawab bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hanya kadang-kadang dalam mengadakan Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg dalam rekapitulasi indikator Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg.

c. Tidak baik : Apabila mayoritas responden menjawab bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak pernah mengadakan Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg dalam rekapitulasi indikator Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi, Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg.

2. Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.

a. Baik : Apabila mayoritas responden menjawab selalu melakukan Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg pada rekapitulasi indikator Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.

- b. Kurang baik : Apabila mayoritas responden menjawab hanya kadang-kadang melakukan Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg pada rekapitulasi indikator melakukan Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.
 - c. Tidak baik : Apabila mayoritas responden menjawab tidak pernah melakukan Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg pada rekapitulasi indikator melakukan Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.
- 3. Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI.
 - a. Baik : Apabila mayoritas responden menjawab selalu ada Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI pada rekapitulasi indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI.
 - b. Kurang baik : Apabila mayoritas responden menjawab hanya sesekali/ kadang-kadang ada Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI pada

rekapitulasi indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI.

- c. Tidak baik : Apabila mayoritas responden menjawab tidak pernah ada Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI pada rekapitulasi indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator pengganti, dan Aksesoris yang berstandar SNI.

4. Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg.

- a. Baik : Apabila mayoritas responden menjawab selalu ada Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada rekapitulasi indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg.
- b. Kurang baik : Apabila mayoritas responden menjawab hanya sesekali/kadang-kadang ada Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada rekapitulasi indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg.
- c. Tidak baik : Apabila mayoritas responden menjawab tidak pernah ada Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada rekapitulasi indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, kualitatif adalah proses pencairan data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2007:9).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Agen distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2007:80) Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebanyak 53 orang dan Agen distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru sebanyak 11 agen, dan 600 penyalur.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan cara tertentu. Sugiyono (2007:81). Dari penjelasan ini maka penelitian akan berhadapan dengan populasi yang bersifat heterogen, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan menggunakan proposive sampling untuk pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sensus populasi untuk Agen gas LPG 3 Kg dan teknik slovin untuk Penyalur.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Lokasi	Populasi	Sampel	Teknik Sampel
1	Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	53	4	Proposive Sampling
2	Agen Gas LPG 3 Kg	11	11	Sensus Populasi
3	Penyalur Gas LPG 3 Kg	600	85	Teknik Slovin
Jumlah			100	

Sumber : Data Olahan 2013

Tabel 3.2 Data Sampel Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Jabatan	Sampel
1	Kepala Dinas	1
2	Kepala Bidang Perdagangan	1
3	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan	1
4	Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi	1
Jumlah		4

Sumber : Data Olahan 2013

Adapun populasi dari data diatas dapat dilihat sebesar 53 orang Pegawai, 11 Agen distribusi gas LPG 3 Kg dan 600 penyalur. Adapun jumlah sampel yang diambil dari Pegawai sebanyak 4 orang pegawai menggunakan proporsive sampling, Agen adalah 11 sampel, ini dilakukan dengan cara sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel penelitian ini, Sedangkan untuk penyalur yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Nc^2} \longrightarrow \text{Teknik Slovin (Umar Husein)}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600 (0,01)}$$

$$n = \frac{600}{1 + 600}$$

$$n = \frac{600}{7}$$

$$n = 85,7 = 85 \text{ Penyalur (digenapkan jumlahnya).}$$

Jadi sampelnya adalah berjumlah sebanyak 85 Penyalur..

Proposive sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. (Sugiyono, 2007:218).

3.4 Jenis Data

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Contohnya : melalui quisioner berupa pertanyaan dan wawancara.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Misalnya dari Literatur/ informasi dari instansi terkait dalam penelitian.

Pengumpulan data melauai data primer dan sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang jelas dengan tujuan penelitian serta untuk memperoleh informasi yang akurat sehingga penelitian dapat berhasil dilaksanakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peneliti. Dalam melaksanakan Observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung

kelapangan untuk melihat keadaan secara nyata, yaitu ke agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

2. Angket yaitu upaya pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawabannya kemudian disebar kepada responden. Yaitu kepada agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.
3. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam wawancara peneliti meminta informasi kepada Key Informan yang terdiri dari beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3.6 Analisis Data

Analisa Data Adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, quisoner, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

Setelah seluruh data penelitian terkumpul semuanya, data-data tersebut di kelompok-kelompokan dan ditabulasi menurut jenis data, serta data tersebut dibawahnya ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dari hasil olahan data untuk dapat menjelaskan hasil penelitian dan kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pehubungan darat, sungai dan udara. Terletak antara 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah :

1. Sebelah Utara : Kab Siak & Kab Kampar.
2. Sebelah Selatan : Kab Kampar & Kab Pelalawan.
3. Sebelah Barat : Kab Siak & Kab Pelalawan.
4. Sebelah Timur : Kab Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 7 September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² yang terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dengan 58 kelurahan/desa.

Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak di jalur lintas timur Pulau Sumatra dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatra memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang

terletak di tengah-tengah Pulau Sumatra dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan.

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan roda pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.03 Tahun 2004.

4.2 Klimatologi Dan Hidrologi

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,6 C – 33,7 C dan suhu minimum antara 22,1 C – 23,3 C. Curah hujan rata-rata adalah 2.552 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar : musim hujan jatuh pada bulan September sampai bulan Februari dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kelembaban maksimum antara 94 %- 96 % dan kelembaban minimum antara 59 % - 69 %.

Kondisi hidrologi terdiri dari kondisi hidrologi air permukaan dan air bawah tanah. Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai-sungai, terutama Sungai Siak. Hidrologi air bawah tanah dalam berasal dari formasi Petani, dimana sifat air bawah tanahnya kurang baik sebagai air minum. Sedangkan hidrologi air bawah tanah dangkal berasal dari formasi Minas. Bantuan Formasi Minas memiliki kelulusan dan porositas yang tinggi, sehingga

Kota Pekanbaru memiliki potensi ketersediaan air bawah tanah dangkal yang cukup banyak.

Kota Pekanbaru keadaannya 3elative merupakan daerah datar dengan tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bergelombang dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

4.3 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Teratai No. 83, Telp. (0761) 21669, 25174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

4.3.1 Sejarah Singkat / Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

❖ Tahun 1996

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya bernama Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Pekanbaru.

❖ Tahun 2001

Berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 melalui Peraturan Daerah (PERDA) No 07 Tahun 2001 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Membentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag). Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Disperindag adalah sebagai berikut:

1. H. Amir Husin.
2. Drs. H. Kastalani Rahman, M.Si.
3. H. Suraji SH.
4. Ir. Hj. El Syabrina MP. (Sekarang Menjabat).

4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat di lihat di bawah ini :

Kepala Dinas : Ir. Hj. El Syabrina, MP.

Sekertaris : Desvi Emti S.E M.Si.

Kesekretariatan terdiri dari:

- Kepala Subag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- Kepala Subag Keuangan.
- Kepala Subag Penyusunan Program.

Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- Kepala Bidang.
- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
- Kepala Seksi Usaha Perindustrian.
- Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri.

Bidang Perdagangan, terdiri dari :

- Kepala Bidang.
- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.
- Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi.
- Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

Bidang Kerjasama, terdiri dari:

- Kepala Bidang.
- Kepala Seksi Pengkajian dan Koordinasi.
- Kepala Seksi Kerjasama Perindustrian.
- Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan.

Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :

- Kepala Bidang
- Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.
- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen.
- Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

4.3.3. Uraian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan.
- b. Mendorong penyelenggaraan barang kemitraan industri kecil, menengah, dan sektor ekonomi lainnya.
- c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- e. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok.
- f. Pemberian izin industri dan kawasan industri.
- g. Pemberian perizinan dibidang Industri dan Perdagangan, termasuk izin kawasan industri.
- h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin.
- i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
- j. Pengendalian pencemaran limbah industri.
- k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
- l. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.
- m. Penetapan tara dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan).

- n. Pemberian izin gudang.
- o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.
- p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah.
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota.
- s. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah.
- t. Perizinan di bidang Industri dan Perdagangan Daerah.
- u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produk Industri dan Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan.
- w. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan.
- x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan.
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan.
- z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

Uraian tugas dan fungsi yang ada di setiap Bagian sebagai berikut.

A. KEPALA DINAS.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Azas Otonomi Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. BIDANG PERDAGANGAN

1. Subdin Perdagangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan kemampuan pengusaha, bimbingan terkait pengembangan ekspor - impor serta evaluasi pelaporan.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi.

- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha pengembangan Ekspor dan Impor.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarah dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah (UKM) supaya berorientasi ekspor.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia perdagangan.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap perdagangan, kemetrolgian, pendaftaran perusahaan serta evaluasi hasil kegiatan di bidang tersebut.
- g. Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi :

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.
- 2) Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi.
- 3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan prosedur (Tata Laksana) pembinaan dan pengembangan serta menyediakan dukungan dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran dan kerjasama khususnya perdagangan luar negeri.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan impor – ekspor.
- b. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap bimbingan dan informasi, fasilitas yang dibutuhkan bagi peningkatan dan pengembangan perdagangan terutama di bidang impor – ekspor.
- c. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap pengendalian barang – barang impor.
- d. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap upaya peningkatan barang – barang ekspor terutama pengembangan ekspor produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

- e. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama dalam upaya pengawasan terhadap mutu barang – barang impor dan yang akan di ekspor.
- f. Mempersiapkan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) umum.
- g. Mempersiapkan, meneliti dan memproses permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) umum.
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi.

Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penyediaan barang dan stabilitas harga barang di pasar bebas (terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat), penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan dan Operasi Pasar di Kota Pekanbaru serta penyaluran pengawasan kemetrologian.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi sebagai acuan dalam menjalankan tugas.
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantuan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis.
- e. Melakukan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terutama Distributor/Pedagang Besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dan memberikan rekomendasi guna penerbitan SIUP M-B, Keagenan/Distributor, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) serta Berita Acara Pemeriksaan Gudang.
- f. Merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP, TDP, Agen/Distributor, Asosiasi dan Gudang di Kota Pekanbaru.
- g. Melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) serta melaksanakan tugas metrologi lain yang bekerjasama dengan Balai Metrologi Disperindag Provinsi Riau.
- h. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka melaksanakan Operasi Pasar bahan pokok dan barang penting.

- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pendaftaran perusahaan sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta UU dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pendaftaran Perusahaan di Kota Pekanbaru.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memahami Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
- c. Memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan.
- d. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan.
- e. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar Perusahaan.

- f. Menyediakan data tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi.
- g. Melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman dahulu Pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Mulanya daerah ini merupakan lading yang lambat laut berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.

Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat tahun 1971) mendirikan istana di Kampung Bukit berdekatan dengan Perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis sang Sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali (1784-1801) di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggalkan dan mulai di ganti dengan nama Pekan Baharu atau disebut dalam penyebutan pekanbaru sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu *Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian

dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik (zaman penjajahan Belanda). Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukan ke wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur*. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut dengan *gokung*

Akhirnya setelah Indonesia merdeka dan zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi:

1. Daerah Otonom yang disebut Haminte (Kota Besar) dan merupakan ibukota keresidenan berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946
2. Kota kecil, bagian dari kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1984.
3. Kota Kecil berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1956.
4. Kota praja berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1957.
5. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindah dari tanjung Pinang berdasarkan Kepmendagri No.52/I/44-25 tanggal 20 januari 1957.
6. Kotamadyan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974
7. Kota berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang penyajian data yang diperoleh penulis selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjumlah 4 pegawai, menyebarkan kuisisioner (angket) kepada agen gas LPG 3 Kg yang berjumlah 11 agen dan penyalur gas LPG 3 Kg yang berjumlah 85 penyalur dengan total jumlah kuisisioner sebanyak 96 kuisisioner, serta observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Agen dan Penyalur gas LPG 3 Kg serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Kuisisioner dalam penelitian ini sifatnya tertutup, responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia, kemudian setiap jawaban dari pertanyaan akan di distribusikan ke dalam bentuk tabel frekuensi.

Hasil penelitian akan dibagi ke dalam tiga bagian, yang meliputi :

1. Bagian pertama berisikan pertanyaan yang memuat identitas responden yang akan memberikan tanggapan.
2. Bagian kedua berisikan pertanyaan dan jawaban responden dari masing-masing indikator dalam setiap sub variabel penelitian, yang disajikan dalam bentuk tabel.
3. Bagian ketiga berisikan rekapitulasi jawaban responden dalam setiap sub variabel penelitian.

5.1 Identitas Responden

Identitas responden dari penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang berjumlah 100 orang yaitu 96 sebagai responden dari agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dan 4 orang dari pegawai dinas yang dijadikan sebagai key informan, dan selanjutnya penulis mengklarifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur dan nama agen penyalur gas LPG 3 Kg.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, berikut penulis akan menguraikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	71	74 %
2	Perempuan	25	26 %
Jumlah		96	100 %

Sumber : Data Olahan 2013.

Dari tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden yang memberikan tanggapan terhadap penelitian ini terdiri dari 71 responden laki-laki atau 74 %, sedangkan responden perempuan sebanyak 25 orang atau 26 %. Jadi jumlah keseluruhan responden yang di jadikan sampel pada penelitian ini yaitu agen dan penyalur gas LPG 3 Kg adalah sebanyak 96 orang.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dari agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru adalah laki-laki yang berjumlah 71 orang responden dan perempuan hanya berjumlah 25 orang responden.

Selanjutnya untuk mengetahui identitas responden berdasarkan tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat umur

No	Umur (Tahun)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	30-35	9	9 %
2	36-40	32	33 %
3	41-45	38	40 %
4	46-50	13	13 %
5	51-55	4	4 %
6	56-60	1	1 %
Jumlah		96	100 %

Sumber : Data Olahan 2013.

Dari tabel 5.2 diatas dapat di lihat bahwa tingkat umur responden mayoritas berada pada Tingkat umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 38 responden atau 40 %, selajnutnya di ikuti Tingkat umur 36-40 sebanyak 32 responden atau 33 %, kemudian Tingkat umur 46-50 sebanyak 13 responden atau 13 % selanjutnya Tingkat umur 30-35 sebanyak 9 responden atau 9 %, selanjutnya Tingkat umur 51-55 sebanyak 4 responden atau 4 % dan yang paling sedikit Tingkat umur 56-60 sebanyak 1 responden atau 1 %.

Dari data diatas dapat di lihat bahwa tingkat umur responden yang memberikan tanggapan sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan dalam quisioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan jawaban yang tepat dan sesuai sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya..

Selanjutnya untuk mengetahui identitas responden berdasarkan Agen penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agen Penyalur Gas LPG 3 Kg

No	Nama Agen	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	PT Valery Family Sejahtera	10	11 %
2	PT Hasanudin Bersaudara	9	9 %
3	PT Garuda Mandiri	7	7 %
4	PT Tirta Harapan Sejahtera	8	8 %
5	PT Buchari	9	9 %
6	PT Melayu Bumi Lestari	7	7 %
7	PT Pusaka Indra Puri	9	9 %
8	PT Lisfa Inti Selaras	10	11 %
9	PT Alam Anugrah Sejahtera	8	8 %
10	Primer Koperasi Kartika	10	11 %
11	PT Sari Bumi Raya	9	9 %
Jumlah		96	100 %

Sumber : Data Olahan 2013.

Dari tabel 5.3 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas frekuensi responden berdasarkan agen penyalutr gas LPG 3 Kg yang berjumlah 11 agen adalah yang tertinggi sebanyak 10 responden, atau 11 % dari jumlah keseluruhan responden yang terdapat pada 3 agen gas LPG 3 Kg, selanjutnya di ikuti dengan 9 responden atau 9 % dari keseluruhan responden yang terdapat pada 4 agen gas LPG 3 Kg, selanjutnya di ikuti oleh 8 responden atau 8 % yang terdapat pada 2 agen gas LPG 3 Kg, dan yang terkecil sebanyak 7 responden atau 7 % dari keseluruhan jumlah responden yang terdapat pada 2 agen gas LPG 3 Kg.

Hal ini di lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyera di setiap agen dan penyalur gas LPG 3 KG di Kota Pekanbaru, di karenakan jumlah agen sebanyak 11 agen gas LPG 3 Kg dan penyalur sebanyak

86 penyalur gas LPG 3 Kg yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru. Jadi agar seimbang maka penulis mengambil rata-rata di setiap agen dan penyalur 10 responden pada 3 agen gas LPG 3 Kg, selanjutnya 9 responden pada 4 agen gas LPG 3 Kg, selanjutnya 8 responden pada 2 agen gas LPG 3 Kg dan 7 responden pada 2 agen gas LPG 3 Kg.

5.2 Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Pada Agen dan Penyalur Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kegiatan pengawasan menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan

pengamatan langsung oleh pengawas dilapangan. Informasi tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen organisasi.

Khusus untuk Kota Pekanbaru, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur berdasarkan pada Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, dan juga pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat keputusan tentang gas LPG 3 Kg yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru.

Maksud dari pengaturan ini adalah untuk memelihara, mengawasi, memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru sehingga dapat terlaksana dengan baik proses pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Pengawasan yang di lakukan meliputi :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalah gunaan gas LPG 3 Kg.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Dari penjelasan di atas pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di bagi dalam beberapa bagian

pengawasan, yang pertama kelembagaannya, yaitu mengawasi pola distribusi gas LPG 3 Kg mulai dari Pertamina ke SPBG, dari SPBG ke Agen gas LPG 3 Kg, setelah itu ke Penyalur gas LPG 3 Kg dan terakhir ke masyarakat. Sudah benarkah pola distribusinya itu, apabila sudah benar berarti dari segi kelembagaannya sudah benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kedua pengawasan yang dilakukan dengan sistem formal dan informal, sistem formal melakukan pengawasan dengan memberikan izin-izin terkait distribusi gas LPG 3 Kg baik itu berupa SIUP, SITU, TDP, serta izin rekomendasi dari Pertamina.

Sedangkan sistem informal dengan cara turun langsung ke lapangan dan memeriksa semua yang terkait dengan proses distribusi serta peralatan pelengkap keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg berupa racun api, timbangan bencana air dan kendaraan yang dipakai dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan suatu instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi jalannya proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, selain pelaksanaan pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada setiap Agen dan Penyalur yang tidak sesuai dengan aturan pendistribusian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan kecurangan, penyimpangan yang dilakukan oleh agen maupun penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru demi terpenuhinya kebutuhan

gas bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Dari beberapa agen dan penyalur yang penulis lakukan observasi menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pernah melakukan pengecekan langsung ke tempat agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru. Mereka memeriksa segala persyaratan dan kelengkapan dokumen ataupun peralatan yang digunakan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg. Sebagian dari agen dan penyalur gas LPG 3 Kg masih belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, walaupun demikian hal ini masih diberi toleransi waktu untuk melengkapinya.

Untuk pendistribusian gas LPG 3 Kg tidak semua masyarakat yang berhak mendapatkannya, hal ini dikarenakan gas LPG 3 Kg diperuntukkan untuk masyarakat golongan bawah serta usaha mikro kecil. Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni
- c. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sampai saat ini terus melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg serta melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang segala yang berhubungan dengan gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

5.2.2 Tanggapan Responden

Adapun indikator untuk mengetahui tingkat pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg.

Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa dalam proses pendistribusian gas LPG 3 Kg Kepada masyarakat tidak terjadi perbedaan harga jual eceran pada setiap agen penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu

harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru Rp 14.000,- sehingga masyarakat tidak keberatan dan susah dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg, selanjutnya jumlah gas LPG 3 Kg yang didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat jangan sampai terjadi kekurangan pasokan gas LPG 3 Kg, sasarannya tepat pada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru, waktu dalam pendistribusian harus sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan serta mutu dari gas LPG 3 Kg yang didistribusikan kepada masyarakat itu bagus tidak dicampur dengan bahan lain, asli merupakan gas bumi dan sesuai dengan standar nasional.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan tentang Ketepatan Harga Eceran Tertinggi yakni Rp 14.000,- yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	43	45 %
2	Kadang-kadang	44	46 %
3	Tidak Pernah	9	9 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.4 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan Ketepatan Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang dengan jumlah 44 orang atau 46 % dari keseluruhan

responden, selanjutnya di ikuti dengan jumlah 43 orang atau 44 % responden yang mengatakan Selalu dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Tidak Pernah berjumlah 9 orang atau 9 %.

Berdasarkan hasil dari observasi penulis di lapangan ternyata memang masih ditemukan beberapa penyalur yang menjual gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu ada yang menjual dengan harga Rp 15.000,- Hal ini juga di akui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru harga jual seharusnya Rp 14.000,- hal ini sudah dijalankan oleh beberapa penyalur, tapi sampai saat ini masih kita jumpai penyalur yang menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 15.000,- untuk sementara kita masih toleren karena mereka beralasan tidak ada untung kalau kami jual Rp 14.000,- tapi untuk kedepannya akan kita mulai setarakan harganya supaya tidak terjadi problema di masyarakat kita.” (wawancara, 25-03-2013)

Dari data diatas terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih belum secara menyeluruh mengawasi ketetapan harga eceran tertinggi gas LPG 3 Kg kepada seluruh penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini terbukti dengan masih ditemukannya beberapa penyalur gas LPG 3 Kg yang ada di kota pekanbaru yang menjual gas LPG 3 Kg diatas harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp 14.000,-.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan Jumlah Tabung gas LPG 3 Kg yang di distribusikan kepada masyarakat dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Jumlah Tabung Gas LPG 3 Kg Yang Didistribusikan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	28	29 %
2	Kadang-kadang	48	50 %
3	Tidak Pernah	20	21 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.5 diatas menunjukan bahwa Mayoritas responden mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan yaitu sebanyak 48 orang atau 50 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti dengan tanggapan responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Selalu yaitu sebanyak 28 orang atau 29 %, dan yang paling sedikit mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tidak Pernah sebanyak 20 orang atau 21 % dari jumlah keseluruhan responden. Dari data diatas berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan pengawasan jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ternyata masih kadang-kadang di lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Tabung-tabung yang didistribusikan agen/penyalur gas LPG 3 Kg kepada masyarakat kita lakukan pengawasan dengan memeriksa jumlah kebutuhan tabung gas LPG 3 Kg di setiap agen/penyalur, berapa yang dibutuhkan baik untuk agen atau penyalur dan berapa pula yang mereka pasok ke panyalur, terkadang jumlah tabung yang didistribusiakn itu kurang, makanya kita awasi jangan sampai terjadi kekurangan dalam pasokan tabung gas LPG 3 Kg kepada masyarakat kita”. (wawancara, 25-03-2013)

Berdasarkan data diatas pengawasan terhadap jumlah gas LPG 3 Kg yang di distribusikan kepada masyarakat telah di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pengawasan ini di lakukan dengan melakukan pengecekan langsung ke agen dan penyalur gas LPG 3 Kg memeriksa setiap kebutuhan dari gas LPG 3 Kg yang dapat dilihat dari daftar kebutuhan di setiap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Sasaran dari Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Sasaran Dari Distribusi Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	32	33 %
2	Kadang-kadang	52	54 %
3	Tidak Pernah	12	13 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa pengawasan terhadap sasaran dari distribusi gas LPG 3 Kg yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ternyata Mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang yaitu sebanyak 52 orang atau 54 %, selanjutnya diikuti dengan responden

yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Selalu sebanyak 32 orang atau 33 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tidak Pernah sebanyak 12 orang atau 13 %. Hal ini di tambahkan dengan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan:

“Pola distribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah itu di dalamnya sudah jelas siapa yang berhak untuk menerima dan memakai gas LPg 3 Kg, tapi sampai saat ini masyarakat kita masih belum tau entah memang tidak tau atau pura-pura tidak tau, seolah-olah sasaran gas LPG 3 Kg ini untuk semua golongan masyarakat, padahal tidak semuanya, itulah yang masih kita lakukan pengawasannya yaitu dengan terus melakukan sosialisasi, tapi untuk sementara ini bolehlah dan untuk kedepannya akan kita tertipkan lagi”. (wawancara, 25-03-2013)

Berdasarkan data diatas dapat di jelaskan bahwa sasaran dari distribusi gas LPG 3 Kg sebenarnya telah di tetapkan oleh pemerintah yaitu rumah tangga Ibu rumah tangga pengguna minyak tanah murni kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan), serta Usaha mikro yang kriterianya merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya. Selain dari yang telah di tetapkan tidak berhak menggunakan gas LPG 3 Kg, tapi pada kenyataannya masyarakat kita belum sepenuhnya mengetahui sasaran dari distribusi gas LPG 3 Kg apakah memang tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu padahal sudah di lakukan sosialisasi, sehingga semua golongan masyarakat bebas untuk menggunakan gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap waktu pendistribusian gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Waktu Distribusi
Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	13	14 %
2	Kadang-kadang	35	36 %
3	Tidak Pernah	48	50 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.7 diatas dapat kita lihat bahwa pengawasan terhadap waktu distribusi gas LPG 3 Kg yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ternyata Mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 48 orang atau 50 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang sebanyak 35 orang atau 36 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Selalu sebanyak 13 orang atau 14 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan dari responden di dominasi dengan tanggapan Tidak Pernah yang artinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pengawasan terhadap waktu dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.dengan keadaan yang seperti ini bisa memungkinkan terjadi keterlambatan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada penyalur dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Mutu dari Gas LPG 3 Kg yang didistribusikan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Terhadap Mutu/kualitas Gas
LPG 3 Kg Yang Didistribusikan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	15	16 %
2	Kadang-kadang	48	50 %
3	Tidak Pernah	33	34 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa Mayoritas responden mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan terhadap mutu dari gas LPG 3 Kg yaitu sebanyak 48 orang atau 50 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti dengan tanggapan responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 33 orang atau 34 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 15 orang atau 16 % dari jumlah keseluruhan responden. Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Pengawasan terhadap Kualitas/mutu dari gas LPG 3 Kg ini kami lakukan dengan langsung mengecek ke lapangan dengan memeriksa tabung-tabung gas LPG 3 Kg apakah benar isinya dari tabung gas LPG ini gas bumi dari pertamina yang telah di olah atau di isi dengan gas lain yang tidak sesuai, hal ini bisa saja terjadi kalau pemerintah kita tidak ketat mengawasinya”.
(wawancara, 25-03-2013)

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dikatakan mutu dari gas LPG 3 Kg telah di uji oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan dapat dikatakan kualitas dari mutu gas LPG 3 Kg bagus dan tidak terjadi pencampuran dengan gas lainnya. Dan sampai saat sekarang masih terus diawasi

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar tidak terjadi pencampuran gas dengan bahan gas lain serta penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/Sanksi Yang diberikan Oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	4	4 %
2	Kadang-kadang	43	45 %
3	Tidak Pernah	49	51 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.9 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Peringatan/Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah di beri Sanksi dengan jumlah 49 orang atau 51 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 43 orang atau 45 % responden yang mengatakan Kadang-kadang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan sanksi dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Selalu memberikan sanksi berjumlah 4 orang atau 4 %. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beliau mengatakan :

“Untuk peringatan/sanksi kita telah berikan kepada agen dan penyalur bagi mereka yang terbukti melakukan kesalahan dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg, tapi untuk sementara peringatan yang kita berikan ini masih bersifat sanksi ringan yaitu menegur secara lisan, mengingatkan kembali belum kita berikan sanksi tang tegas karena masih dalam proses yang

dilakukan oleh Pemerintah tapi apabila terdapat kesalahan fatal maka kita akan tindak tegas supaya tidak terjadi kerusakan di kemudian hari”. (wawancara, 25-03-2013)

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan dari Indikator Pengawasan Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Jumlah, Sasaran, dan Mutu Gas LPG 3 Kg, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Jumlah, Sasaran, dan Mutu Gas LPG 3 Kg

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah Responden
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	1	43	44	9	96
2	2	28	48	20	96
3	3	32	52	12	96
4	4	13	35	48	96
5	5	15	48	33	96
6	6	4	43	49	96
Jumlah Rata-rata		23	45	28	96
Persentase (%)		24 (%)	47 (%)	29 (%)	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari rekapitulasi tabel 5.10 diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg dari Indikator Pengawasan Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Jumlah, Sasaran, Waktu dan Mutu Gas LPG 3 Kg, mayoritas responden mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan yaitu sebanyak 45 orang atau 47 %, selanjutnya diikuti oleh responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 28 orang atau 29 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 23 orang atau 24 %.

Dari data diatas dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dinilai Kurang Baik karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan tersebut. Selain itu dari hasil penelitian di lapangan di dapat kendala yang terjadi yaitu tidak secara merata di lakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Keterbatasan sumber daya manusia sehingga terkadang menyulitkan dalam menjangkau tempat yang jauh, serta kurangnya informasi dari penyalur gas LPG 3 Kg.

B. Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.

Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi peredaran-peredaran tabung gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, baik untuk dalam Kota Pekanbaru maupun Luar Kota Pekanbaru, peredaran tabung gas LPG 3 Kg tersebut harus selalu diawasi supaya tidak dijadikan suatu objek penyalahgunaan tabung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan bagi masyarakat, karena bisa terjadi kelangkaan pasokan tabung gas LPG 3 Kg, tabung gas LPG 3 Kg itu merupakan barang milik negara yang harus dijaga keberadaannya serta diperbaharui apabila telah rusak. Sehingga terjamin kualitas dari tabung gas LPG 3 Kg tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih terus melakukan pengawasan terhadap peredaran tabung dengan cara turun langsung ke lapangan guna mencek dan mengawasi peredaran tabung serta penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan Peredaran Tabung gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Peredaran Tabung Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	28	29 %
2	Kadang-kadang	59	62 %
3	Tidak Pernah	9	9 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.11 diatas dapat kita lihat bahwa pengawasan terhadap peredaran tabung gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ternyata Mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang yaitu sebanyak 59 orang atau 62 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Selalu sebanyak 28 orang atau 29 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tidak Pernah melakukan pengawasan sebanyak 9 orang atau 9 %. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beliau mengatakan :

“Dalam pengawasan peredaran tabung gas LPG 3 Kg dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru melakukan pengawasan secara integrasi mulai dari SPBG sampai ke penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini di lakukan supaya barang yang untuk wilayah kota pekanbaru tidak di jual ke luar kota pekanbaru, apabila kita tidak melakukan dengan hal demikian bisa jadi gas LPG 3 Kg yang seharusnya untuk wilayah kota pekanbaru di jual ke luar kota pekanbaru dengan harga yang sama bahkan murah, atau

barang yang untuk wilayah luar kota pekanbaru di jual di dalam kota pekanbaru, hal ini dapat membuat penyalur yang berada di dalam kota pekanbaru kehilangan mata pencahariannya dari penjualan gas LPG 3 Kg”. (wawancara, 26-04-2013)

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa proses pengawasan peredaran tabung gas LPG 3 Kg yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, mulai dari spbg sampai ke penyalur gas LPG 3 Kg, bahkan sampai mengecek langsung ke lokasi, akan tetapi proses pelaksanaan pengawasan ini tidak dilakukan secara rutin masih terkadang-kadang, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Tanggapan Cepat dari Agen terhadap Kerusakan/kebocoran pada tabung gas LPG 3 Kg dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12
Tanggapan Responden Mengenai Tanggapan Cepat dari Agen terhadap Kerusakan/Kebocoran Tabung Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	45	47 %
2	Kadang-kadang	42	44 %
3	Tidak Pernah	9	9 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.12 diatas dapat kita lihat bahwa adanya tanggapan cepat dari agen terhadap kerusakan/kebocoran dari tabung gas LPG 3 Kg ternyata Mayoritas responden mengatakan Selalu ada tanggapan cepat dari agen terhadap kerusakan/kebocoran dari tabung gas LPG 3 Kg yaitu sebanyak 45 orang atau 47 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Kadang-kadang

sebanyak 42 orang atau 44 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Tidak Pernah ada tanggapan cepat dari agen terhadap kerusakan/kebocoran dari tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 9 orang atau 9 %. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Memang ada pernah ditemukan di lapangan tabung gas LPG 3 Kg yang rusak ataupun bocor di biarkan saja terletak di gudang, belum seluruhnya ada tanggapan cepat baik dari agen gas LPG 3 Kg ataupun Pertamina, terkadang para penyalur mengeluh kepada kami kenapa lambat tabung rusak atau bocor di ganti, sedangkan untuk melihat kebocoran gas pada tabung gas itu bisa di lakukan dengan cara merendam tabung di air nanti akan kelihatan bocor atau tidaknya tabung gas LPG 3 Kg”. (wawancara, 25-03-2013)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden di dominasi Selalu yang artinya bahwa memang ada tanggapan cepat dari agen terhadap kerusakan/kebocoran dari tabung gas LPG 3 Kg sampai saat sekarang ini tapi hal ini tidak setiap waktu di lakukan oleh agen gas LPG 3 Kg. Sebagai penyalur dan masyarakat harus tahu tentang tabung gas LPG 3 Kg yang bocor yaitu dengan dengan cara merendam tabung di air nanti akan kelihatan bocor atau tidaknya, dengan cara ini masyarakat dapat lebih memperhatikan dalam setiap distribusi tabung tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kendala yang dihadapi oleh Agen/Penyalar gas LPG 3 Kg dalam pendistribusian gas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Tanggapan Responden Mengenai Kendala yang dihadapi dalam Distribusi Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	2	2 %
2	Kadang-kadang	36	38 %
3	Tidak Pernah	58	60 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.13 diatas dapat kita lihat bahwa adanya kendala yang dihadapi oleh agen/penyalur gas LPG 3 Kg dalam pendistribuisan gas ternyata Mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 58 orang atau 60 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Kadang-kadang ada kendala yang dihadapi oleh agen/penyalur gas LPG 3 Kg sebanyak 36 orang atau 38 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu ada kendala yang dihadapi oleh agen/penyalur gas LPG 3 Kg sebanyak 2 orang atau 2 %. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan:

“Untuk kendala-kendala yang di hadapi oleh kami berupa masih kurangnya kerjasama masyarakat dengan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam artian masyarakat itu tidak sepenuhnya menjalankan apa yang telah kami sampaikan, sosialisasikan dan pemberitahuan pada setiap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg sehingga terkadang menjadi problema dalam distribusi gas LPG 3 Kg”. (wawancara, 26-04-2013)

Dari data diatas dijelaskan bahwa dalam hal kendala-kendala proses distribusi gas LPG 3 Kg didominasi dengan Tidak Pernah ada kendalla yang di hadapi selama proses distribusi gas LPG 3 Kg, akan tetapi hal ini terbalik dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh agen/penyalur dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Penyimpangan dan Penyalahgunaan gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.14
Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	3	3 %
2	Kadang-kadang	29	30 %
3	Tidak Pernah	64	67 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.14 diatas dapat kita lihat bahwa Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Penyimpangan dan Penyalahgunaan gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru ternyata Mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 64 orang atau 67 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Kadang-kadang sebanyak 29 orang atau 30 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu sebanyak 3 orang atau 3 %. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Untuk peringatan/sanksi kita telah berikan kepada agen dan penyalur bagi mereka yang terbukti melakukan kesalahan dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg, tapi untuk sementara peringatan yang kita berikan ini masih

bersifat sanksi ringan yaitu menegur secara lisan, mengingatkan kembali karena pola distribusi ini belum final sifatnya, belum kita berikan sanksi tang tegas karena masih dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah apabila telah ditetapkan baru kita tindak tegas”. (wawancara, 26-04-2013)

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan aturan ternyata masih bersifat sanksi ringan yaitu dengan menegur dan memberikan peringatan lisan terhadap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini dikarenakan pola distribusi gas LPG 3 Kg yang sedang di jalankan masih belum final sifatnya. masih perlu waktu untuk menetapkan aturan ini secara menyeluruh kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Kelengkapan Dokumen dalam melakukan Pendistribusian gas LPG 3 Kg dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Kelengkapan
Dokumen dalam Melakukan Pendistribusian gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	7	7 %
2	Kadang-kadang	38	40 %
3	Tidak Pernah	51	53 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel 5.15 diatas dapat kita lihat bahwa Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ternyata Mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 51 orang atau 53 %, selanjutnya diikuti dengan responden yang mengatakan Kadang-kadang

sebanyak 38 orang atau 39 %, dan yang paling sedikit yaitu responden yang mengatakan sebanyak 7 orang atau 7 %.

Bentuk pengawasan terhadap kelengkapan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan distribusi gas LPG 3 Kg yaitu berupa pemeriksaan terhadap Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan Migas, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin dan Rekomendasi dari Pertamina selaku Agen dan Penyalur Resmi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, apabila tidak lengkap maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan diberikan sanksi/peringatan.

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan dari Indikator Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah Responden
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	1	28	59	9	96
2	2	45	42	9	96
3	3	2	36	58	96
4	4	3	29	64	96
5	5	7	38	51	96
Jumlah Rata-rata		17	41	38	96
Persentase (%)		18 (%)	42 (%)	40 (%)	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel rekapitulasi 5.16 diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg dari Indikator Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan gas

LPG 3 Kg, mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan yaitu sebanyak 41 orang atau 42 %, selanjutnya diikuti oleh responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tidak Pernah melakukan pengawasan yaitu sebanyak 38 orang atau 40 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 17 orang atau 18 %.

Dari data diatas dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru dinilai Kurang Baik karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan tersebut. Selain itu dari hasil penelitian di lapangan di dapat masih banyak tabung-tabung yang rusak terletak di agen dan belum di ganti oleh pertamina selaku pemasok gas LPG 3 Kg serta adanya keluhan dari masyarakat tentang tabung yang di distribusikan kepada masyarakat banyak yang sudah berkarat dan dapat mengkhawatirkan masyarakat dalam menggunakannya.

C. Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI.

Kegiatan pengawasan ini di lakukan untuk memenuhi ketersediaan barang pelengkap gas LPG 3 Kg yang bertandar SNI, Selang dan regulator pengganti merupakan peralatan yang di gunakan untuk menyalurkan gas ke kompor supaya dapat digunakan untuk memasak, peralatan-peralatan tersebut harus diawasi keberadaannya terutama harus berstandar SNI supaya terjamin kualitas barang dan tidak cepat rusak, serta menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

pengawasan ini dilakukan dalam bentuk memeriksa dan mengecek no registrasi, dan no standar nasional. Berikut ini daftar no SNI :

- a. SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG.
- b. SNI 1591:2007 Katup Tabung Baja LPG.
- c. SNI 7368:2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik.
- d. SNI 7369:2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG.
- e. SNI 06-7213-2006 Selang Karet Kompor Gas.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Peredaran peralatan pelengkap dari gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.17
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Peredaran Peralatan Pelengkap Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	12	12 %
2	Kadang-kadang	44	46 %
3	Tidak Pernah	40	42 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.17 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Peredaran peralatan pelengkap dari gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang dengan jumlah 44 orang atau 46 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 40 orang atau 42 % responden yang mengatakan Tidak Pernah dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu berjumlah 12 orang atau 12 %. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Terhadap peralatan pelengkap gas LPG 3 Kg seperti regulator pengganti, selang dan lainnya kami lakukan pengawasan dengan mengecek dan memeriksa standarisasi barang serta no SNI dari barang tersebut, apabila ditemukan yang tidak sesuai maka akan kami tarik barang-banrang tersebut dari peredarannya”. (wawancara, 27-03-2013)

Dari data diatas dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap peralatan pelengkap gas LPG 3 Kg dengan cara melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran, memeriksa kelengkapan dan standarisasi dari barang tersebut, selain itu jika di temukan hal-hal yang tidak sesuai denga aturan maka barang-barang tersebut akan dapat di tarik dari peredaran dan di beri sanksi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Ketersediaan Peralatan Pelengkap yang berstandar SNI dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.18
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Ketersediaan Peralatan Pelengkap yang Berstandar SNI dari Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	6	6 %
2	Kadang-kadang	43	45 %
3	Tidak Pernah	47	49 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.18 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap Ketersediaan peralatan pelengkap yang berstandar SNI dari gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah dengan jumlah 47

orang atau 49 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 43 orang atau 45 % responden yang mengatakan Kadang-kadang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan berjumlah 6 orang atau 6 % dari seluruh jumlah responden.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan terhadap Kelayakan dari peralatan pelengkap gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan terhadap Kelayakan dari Peralatan Pelengkap/Aksesoris Gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	5	6 %
2	Kadang-kadang	30	31 %
3	Tidak Pernah	61	63 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.19 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap kelayakan dari peralatan pelengkap/aksesoris gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah dengan jumlah 61 orang atau 63 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 30 orang atau 31 % responden yang mengatakan Kadang-kadang dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu berjumlah 5 orang atau 6 %.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan peralatan pelengkap yang tidak berstandar SNI dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.20
Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	3	3
2	Kadang-kadang	10	10 %
3	Tidak Pernah	83	87 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.20 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Peringatan/sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan peralatan pelengkap yang tidak berstandar SNI mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah dengan jumlah 83 orang atau 87 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 10 orang atau 10 % responden yang mengatakan Peringatan/sanksi Kadang-kadang di berikan dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu ada Peringatan/sanksi berjumlah 3 orang atau 3 %. Sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Apabila ditemukan dari peralatan-peralatan pelengkap dari gas LPG yang tidak sesuai dengan standarisasi maka kami selaku dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru akan menyita dan menarik barang tersebut dari peredaran dan akan memberikan peringatan kepada pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut karena akan dapat merugikan masyarakat kota pekanbaru”. (wawancara, 27-03-2013)

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan dari Indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah Responden
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	1	12	44	40	96
2	2	6	43	47	96
3	3	5	30	61	96
4	4	3	10	83	96
Jumlah Rata-rata		6	32	58	96
Persentase (%)		7 (%)	33 (%)	60 (%)	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel rekapitulasi 5.21 diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg dari Indikator Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI, mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan yaitu sebanyak 58 orang atau 60 %, selanjutnya diikuti oleh responden yang mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengawasan yaitu sebanyak 32 orang atau 33 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 6 orang atau 7 %.

Dari data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap indikator ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih Kurang Baik dikarenakan pengawasan tersebut tidak dilakukan

secara menyeluruh pada semua tempat hanya terbatas pada daerah yang mudah terjangkau saja di karenakan terbatas sarana dan prasarana.

D. Sosialisasi Distribusi Gas LPg 3 Kg.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara distribusi gas LPG 3 Kg yang baik, keamanan dalam proses ditribusi gas LPG 3 Kg, serta mengurangi terjadinya penyalahgunaan akan gas LPG 3 Kg di tengah masyarakat. Bentuk dari kegiatan sosialisai ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan kepada seleruh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru untuk melakukan rapat sosialisasi, hal itu telah di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada tahun 2012 lalu yang bertempat di Kantor, selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan gas LPG 3 Kg tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisai terhadap Distribusi gas LPG 3 Kg dapat kita llihat pada tabel beritku ini :

Tabel 5.22
Tanggapan Responden Mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisai

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	28	29 %
2	Kadang-kadang	54	56 %
3	Tidak Pernah	14	15 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.22 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan Sosialisai terhadap distribusi gas LPG 3 Kg mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang dengan jumlah 54 orang atau 56 % dari keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 28 orang atau 29 % responden yang mengatakan Selalu dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Tidak Pernah berjumlah 14 orang atau 15 %. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Pada tahun 2012 kemaren kami telah melakukan sosialisasi terhadap distribusi gas LPG 3 Kg, kami undang seluruh agen dan penyalur untuk hadir di kantor guna rapat sosialisasi, di dalam sosialisasi tersebut kami berikan aturan-aturan dan pemahaman kepada agen dan penyalur tentang tata cara proses distribusi tersebut, dan juga kami mendengarkan segala kendala dan problematika yang terjadi di lapangan”. (wawancara, 26-04-2013)

Berdasarkan dari data diatas dan observasi yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi terhadap gas LPG 3 Kg yang di laksanakan pada bulan maret tahun 2012 lalu, akan tetapi dari hasil yang di sapat saat melaksanakan sosialisasi jauh dari harapan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dikarenakan agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak semuanya yang hadir pada rapat sosialisasi tersebut, hal ini menjadikan suatu problematika bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan sosialisasi gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pemanggilan Agen/Penyalur untuk melakukan sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.23
Tanggapan Responden Mengenai Pemanggilan terhadap Agen/penyalur Untuk Melakukan Sosialisai

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	17	18 %
2	Kadang-kadang	55	57 %
3	Tidak Pernah	24	25 %
Jumlah		96	(%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.23 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan kepada Agen/penyalur untuk Sosialisai terhadap distribusi gas LPG 3 Kg mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang dengan jumlah 55 orang atau 57 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti 24 orang atau 25 % responden yang mengatakan Tidak Pernah ada melakukan pemanggilan kepada Agen/penyalur untuk Sosialisai dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Selalu ada melakukan pemanggilan kepada Agen/penyalur untuk Sosialisai berjumlah 17 orang atau 18 %. Hal ini serupa dengan yang penulis dapatkan berdasarkan informasi dari wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Dalam rencana awal sosialisasi ini harus menyeluruh di hadiri oleh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg, tapi kenyataannya pada waktu sosialisasi ternyata hanya sedikit yang memenuhi undangan kami untuk rapat sosialisasi, padahal kita sudah menyebarkan undangan kepada seluruh penyalur, hal ini lah yang menyebabkan kita tehalang dan terkendala dalam melakukan sosialisasi dan

menjadi delmatif karena yang ada saja belum tentu dengar apa yang kita sampaikan apalagi yang tidak hadir rapat mereka tidak tau apa yang kita sampaikan”. (wawancara, 26-04-2013)

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan pengecekan langsung ke Agen/penyalur terkait keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.24
Tanggapan Responden Mengenai Pengecekan langsung ke Agen/penyalur terkait Keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	6	6 %
2	Kadang-kadang	45	47 %
3	Tidak Pernah	45	47 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.24 diatas menunjukkan bahwa Mayoritas responden mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Kadang-kadang melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg yaitu sebanyak 45 orang atau 47 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti dengan tanggapan responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 45 orang atau 47 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 6 orang atau 6 % dari jumlah keseluruhan responden. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Selain memanggil agen dan penyalur kami juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan baik dalam waktu kerja ataupun di luar jam kerja, pengecekan yang kami lakukan terkait semua peralatan yang ada, baik itu

peralatan destop dan juga peralatan keamanan yaitu racun api, timbangan bencana air. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi terjadi penyimpangan dan hal-hal yang bisa merugikan agen/penyalur bahkan masyarakat kita”. (wawancara, 25-03-2013)

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berupa semua peralatan yang terkait dengan gas LPG 3 Kg yang ada pada agen dan penyalur gas LPG 3 Kg, baik itu peralatan destop yaitu peralatan pencatatan transaksi jual beli dan juga peralatan keamanan dan keselamatan yaitu racun api untuk mengantisipasi terjadi kebakaran, timbangan bencana air untuk melihat kondisi tabung apakah bocor atau tidak, serta peralatan transportasi yang digunakan dalam melakukan proses distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kegiatan Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang baik tentang distribusi gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.25
Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Sosialisasi Memberikan Pemahaman yang baik Terkait Keamanan dalam Distribusi gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	22	23 %
2	Kadang-kadang	45	47 %
3	Tidak Pernah	29	30 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.25 diatas menunjukan bahwa Mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang Kegiatan Sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan pemahaman yang baik tentang distribusi gas LPG yaitu sebanyak 45 orang atau 47 % dari jumlah

keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti dengan tanggapan responden yang mengatakan Tidak Pernah Kegiatan Sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan pemahaman yang baik tentang distribusi gas LPG yaitu sebanyak 29 orang atau 30 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu Kegiatan Sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan pemahaman yang baik tentang distribusi gas LPG sebanyak 22 orang atau 23 % dari jumlah keseluruhan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kerugian yang didapat oleh Agen/Penyalur apabila Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan Sosialisasi Distribusi gas LPG 3 Kg dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Tanggapan Responden Mengenai Kerugian yang di dapat Apabila Tidak Dilakukan Sosialisasi Distribusi gas LPG 3 Kg

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	3	3 %
2	Kadang-kadang	23	24 %
3	Tidak Pernah	70	73 %
Jumlah		96	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 5.26 diatas menunjukan bahwa Mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah ada Kerugian yang didapat oleh Agen/Penyalur apabila Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan Sosialisasi distribusi gas LPG yaitu sebanyak 70 orang atau 73 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya di ikuti dengan tanggapan responden yang mengatakan Kadang-kadang yaitu sebanyak 23 orang atau 24 %, dan yang paling sedikit

mengatakan Selalu sebanyak 3 orang atau 3 % dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang menyatakan :

“Memang tidak ada kerugian yang terlalu buat agen dan penyalur gas LPG 3 Kg mereka menjual dan mencari keuntungan, tapi hal ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat kita selaku pemakai gas LPG 3 Kg, di khawatirkan masyarakat kita yang akan berdampak terhadap hal ini, oleh karena itu kami akan tetap terus melakukan sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg karena sudah menjadi tugas dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru”. (wawancara, 26-04-2013)

Dari data diatas dan hasil observasi yang penulis lakukan dapat di jelaskan bahwa setiap agen dan penyalur tidak sama dalam memberikan tanggapan terhadap kerugian apabila Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan sosialisasi, hal ini mungkin dikarenakan mereka yang menyatakan tidak ada kerugian tidak atang dalam rapat sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg sehingga tidak mengetahui penjelasan yang di berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait distribusi gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan dari Indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Sosialisasi
Distribusi Gas LPG 3 Kg.

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah Responden
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	1	28	54	14	96
2	2	17	55	24	96
3	3	6	45	45	96
4	4	22	45	29	96
5	5	3	23	70	96
Jumlah Rata-rata		15	45	36	96
Persentase (%)		16 (%)	47 (%)	37 (%)	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2013.

Dari tabel rekapitulasi 5.27 diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg dari Indikator Sosialisasi Distribusi Gas LPG 3 Kg, mayoritas responden mengatakan Kadang-kadang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi yaitu sebanyak 45 orang atau 47 %, dari jumlah seluruh responden, selanjutnya diikuti oleh responden yang mengatakan Tidak Pernah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi yaitu sebanyak 36 orang atau 37 %, dan yang paling sedikit mengatakan Selalu sebanyak 15 orang atau 16 % dari jumlah seluruh responden.

Selain itu dari penelitian yang dilakukan di lapangan informasi yang peneliti terima ternyata kegiatan sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg ini tidak diikuti oleh seluruh Agen/penyalur gas LPG 3 Kg, dikarenakan tidak mendapatkan undangan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada

dasarnya undangan sosialisasi yang di keluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah dititipkan melalui agen untuk di sampaikan dan di sebarkan kepada seluruh penyalur gas LPG 3 Kg, namun dari semua undangan yang di titipkan melalui agen sebagian dari agen tidak menyampaikan dan memberikan undangan tersebut kepada seluruh penyalur, sehingga para penyalur tidak mengetahui adanya undangan dan tidak menghadiri acara sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru saat menghadiri acara sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg.

Jadi secara umum dari keempat indikator yang telah dijelaskan diatas dapat kemukakan bahwa masih belum bagus dikarenakan terdapat masalah-masalah di setiap indikator-indikator dari pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, seperti pada indikator pertama masalah yang didapati sampai saat sekarang harga jual eceran tertinggi gas LPG 3 KG masih tidak sama/berbeda disetiap penyalur, sasaran yang belum semuanya tepat sasaran. Pada indikator kedua masalah yang didapati yaitu peredaran tabung yang masih terlambat dalam pendistribusian ke penyalur. Pada indikator ketiga masalah yang didapati yaitu tidak secara rutinnya pelaksanaan pengawasan terhadap peralatan pelengkap dari gas LPG 3 Kg, hal ini bisa memungkinkan terjadinya peredaran peralatan pelengkap yang tidak resmi dan berstandar SNI. Terakhir pada indikator keempat masalah yang didapati yaitu kegiatan sosialisasi distribusi gas LPG 3 Kg kurang berjalan dengan baik dikarenakan pada saat sosialisasi tidak dihadiri oleh seluruh penyalur gas LPG 3 Kg yang ada di Kota Pekanbaru, mereka beralasan tidak tahu

dan tidak mendapatkan undangan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

5.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang terdapat pada tabel rekapitulasi Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru adapun faktor penghambat dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga pelaksanaan pengawasan serta kegiatan lainya yang berhubungan dengan pengawasan jadi terhambat pelaksanaannya karena terbatas biaya operasional. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena pola distribusi ini belum final dari Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
4. Selagi masih dengan sistem terbuka belum menggunakan sistem tertutup dalam melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu seperti menjual barang harian dimana gas LPG 3 Kg tersebut diletak bercampur dengan barang lain, sembarangan letak dan tidak terkontrol dengan baik maka pengawasan distribusi ini tidak dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
5. Masih kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat tentang pola distribusi gas LPG 3 Kg serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas LPG 3 Kg. Hal ini berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan selama melaksanakan penelitian.
6. Pelaksanaan sosialisasi yang belum diikuti oleh seluruh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi gas LPG 3 Kg terhadap agen, penyalur gas serta masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan selama melaksanakan penelitian.

Solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kota Pekanbaru guna meluncurkan kegiatan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg baik berupa Pengecekan langsung ke lapangan serta mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lebih baik lagi.
2. Mengajukan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera mempercepat mengeluarkan Peraturan dan melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg dengan sistem tertutup .
3. Mengadakan sosialisasi setiap rutinnya pada setiap tahunnya mengenai distribusi gas LPG 3 Kg kepada Agen dan Penyalur sehingga dapat menambah wawasan dan menimbulkan rasa kesadaran untuk melakukan distribusi gas LPG 3 Kg dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dan penyalahgunaan dari gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.
4. Melaksanakan pengawasan lapangan dengan lebih sering lagi supaya dapat terkontrol dengan baik proses distribusi dag LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada Agen dan Penyalur yang masih melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru bahkan sampai mencabut izin usahanya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG 3 Kg, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran. Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat Pelaksanaan.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru. maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru belum

optimal, hal ini disebabkan Masih terdapat Agen dan penyalur dari gas LPg 3 Kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru. seperti perbedaan harga jual eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg, kurangnya kesadaran masyarakat dalam keamanan distribusi gas LPG 3 Kg, serta terjadinya penyimpangan dalam melakukan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg.
2. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg tidak dapat terlaksana dengan baik.
3. Selagi masih dengan sistem terbuka belum mneggunakan sistem tertutup dalam melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru yaitu seperti menjual barang harian dimana gas LPG 3 Kg tersebut diletak bercampur dengan barang lain, sembarangan letak dan

tidak terkontrol dengan baik maka pengawasan distribusi ini tidak dapat terlaksana dengan optimal.

6.2 Saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg, melakukan cara-cara terbaru dan terbaik dalam melaksanakan sosialisasi tentang distribusi dan keamanan dalam distribusi gas LPg 3 Kg kepada Agen dan Penyalur.
2. Hendaknya tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Seluruh Agen serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan distribusi gas LPG 3 Kg dapat berjalan dengan baik demi memenuhi kebutuhan gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- Al Qur'an Surat *Al Fajr* Ayat 14.
Al Qur'an Surat *Al Hadid* Ayat 4.
Al Qur'an Surat *Qaaf* Ayat 16.

Buku-Buku

- Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
Kurniawan, Agung. 2005. *Tranpormasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
Kadarman. 2001. *Sistem Pengawasan Management*. Jakarta : Pustaka Quantum.
Kansil, C.S.T. 2002. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
Maman, Ukas. 2004. *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Angnini.
Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Mustafa, Hasan. 2004. *Membidik Pasar Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfa Beta.
Sarifudin, Ateng. 2002. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
Siagian, SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cipta Radar Jaya Offset.
———. 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
———. Siagian, SP. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.
Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiyono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfa Beta.
———. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.
———. 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfa Beta.
Sujanto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Persada Quantum.
Sule, dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
Winardi. 2003. *Azaz-azaz Dalam Management*. Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Perundang- Undang.

- Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru*.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru*.
Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009 *Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg*.

Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian,
dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg*
Undang-Undang No 27 Tahun 2001 *Tentang Kegiatan Usaha Hilir Gas.*
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Tranpormasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Kadarman. 2001. *Sistem Pengawasan Management*. Jakartta : Pustaka Quantum.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Angnini.
- Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Management*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mustafa, Hasan. 2004. *Membidik Pasar Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Sarifudin, Ateng. 2002. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
- Siagian, SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cipta Radar Jaya Offset.
- . 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- . Siagian, SP. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfa Beta.
- . 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.
- . 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfa Beta.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Persada Quantum.
- Sule, dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Winardi. 2003. *Azaz-azaz Dalam Management*. Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Perundang- Undang.

- Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009 *Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg*.
- Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg*
- Undang-Undang No 27 Tahun 2001 *Tentang Kegiatan Usaha Hilir Gas*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Al Qur'an

Al Qur'an Surat *Al Fajr* Ayat 14.

Al Qur'an Surat *Al Hadid* Ayat 4.

Al Qur'an Surat *Qaaf* Ayat 16.